

PERANAN PEMERINTAH KAMPUNG TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ENAROTALI DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI

DAMARIS PASALLI

Program Studi Administrasi Bisnis , Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire

Email:

damarispasalli20174@gmail.com

ABSTRAK

Sejauhmana peranan pemerintah kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Kendala apakah yang dihadapi pemerintah kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peranan pemerintah kampung untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Selama ini aparat kampung rata-rata memiliki sedikit rasa tanggungjawab atas perannya, tetapi belum cukup baik dalam menyiapkan dirinya untuk melakukan kewajibannya atas tugas dan tanggungjawab. Sangat rendahnya kemampuan aparat kampung selaku motivator dalam mendorong dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemampuan komunikasi aparat kampung masih rendah atau belum terlalu mendukung bagi proses pembangunan kampung. Pendapatan masyarakat masih sangat kurang dan masih jauh dibawah garis kemiskinan. Rendahnya pendidikan aparat kampung dan masyarakatnya. Selama ini bidang kesehatan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat dan aparat kampung.

Kata Kunci : Enarotali, Kesejahteraan Masyarakat, Paniai Papua

ABSTRACT

What is the role of the village government in improving the welfare of the people in Enarotali Village, Paniai Timur District, Paniai Regency, what are the constraints faced by the village government in improving people's welfare in Enarotali Village, Paniai Timur District, Paniai Regency What efforts can be made in increasing the role of the village government to seek the welfare of the community in Enarotali Village, Paniai Timur District, Paniai Regency. So far, the average village apparatus has a little sense of responsibility for their role, but has not been good enough to prepare themselves to carry out their duties and responsibilities. Very low ability of village officials as motivators in encouraging and making people aware of the importance of participating in the implementation of community welfare development. The level of communication skills of village officials is still low or not very supportive for the village development process. People's income is still very low and still far below the poverty line. The low level of education of village officials and the community. So far, the community and village officials have not paid much attention to the public health sector.

Keywords: Enarotali, Community Welfare, Paniai Papua

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah : *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya lokal/daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan *ketiga*, untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

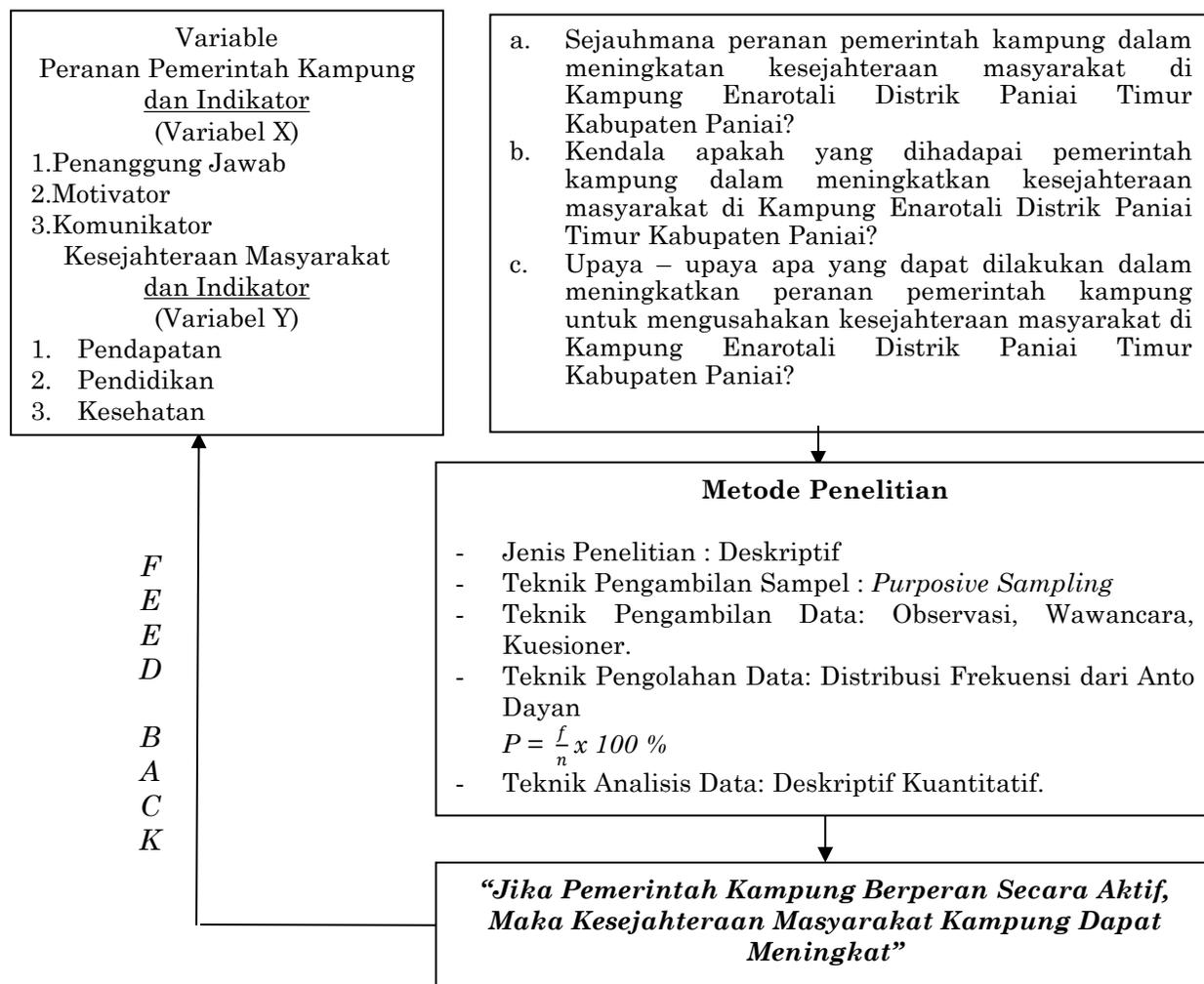
Hanya saja selama ini harapan masyarakat yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas, belum berjalan maksimal, salah satunya terjadi di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Selama ini Pemerintah Kampung Enarotali belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Pemerintah Kampung Enarotali belum dapat menghadirkan dan melakukan pelayanan yang berkualitas untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan masyarakat Kampung Enarotali. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah kampung dalam merespon aspirasi masyarakat kampung. Perintah Kampung Enarotali selama ini kurang memperhatikan usul – saran masyarakat secara seksama dan hanya berkonsentrasi pada persoalan pribadi mereka sendiri. Selama ini, pemerintah kampung hanya berusaha mencari bukti-bukti penggunaan dana kampung secara baik tanpa melihat dampak dari penggunaan dana kampung itu untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Di sisi yang lain, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih berkisar pada belanja barang yang kurang penting sedangkan anggaran untuk belanja publik sering kali diabaikan. Selama ini pola pikir pemerintah kampung bahwa yang terpenting penggunaan dana dan pelaporannya secara habis tuntas, dan mengabaikan sasaran dan tujuan penggunaan dana kampung secara baik. Ini juga membuktikan, bahwa selama ini pertanggungjawaban penggunaan dana kampung belum terlalu transparan sehingga masyarakat tidak dapat mengontrol secara baik penggunaan dana kampung sehingga anggaran yang seharusnya untuk menunjang percepatan kesejahteraan masyarakat kampung, akhirnya kebanyakan dinikmati secara sepihak oleh aparat kampung dan para keluarganya.

Di pihak lain, selama ini dalam pelayanan publik, pemerintah kampung kurang baik, karena aparat Kampung Enarotali kurang memiliki kemampuan dan kompetensi ilmu yang baik. Selama ini orang yang diangkat dan menjabat sebagai aparat kampung hanya karena soal hubungan darah dengan kepala kampung sedangkan mengabaikan kemampuan dan kopetensi aparat sehingga pelayanan public misalnya pengurusan administrasi kampung dan pelayanan lainnya sering lambat dan berbelit-belit, dan hal ini semuanya turut berpengaruh bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

Sejarah Singkat Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur

Kampung Enarotali merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Paniai yang berdiri pada tahun 1974 dengan Kepala Kampung Pertama bernama Wib Yogi yang menjabat pada tahun 1974 – 1984. Pada tahun 1984 Kampung Enarotali dipilihlah seorang Kepala Kampung baru yang bernama Yosep Mote yang menjabat hingga tahun 1994, kemudian pada tahun yang sama yaitu 1994 – 2014 dipilih dan dilantiklah seorang Kepala Kampung yang baru bernama Yau Giyai, dan pada tahun 2014 hingga sekarang Kampung Enarotali dipimpin oleh Kepala Kampung bernama Agustinus Yogi.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber Data : Alur Pikir Penulis, 2020

METODOLOGI

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka untuk memecahkan masalah tersebut secara ilmiah penulis menggunakan metode tertentu yang dianggap relevan dengan prosedur atau alat. Selain itu, kerangka atau desain yang digunakan dalam membahas masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain sebagai berikut

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah dengan menggunakan secara kualitatif deskriptif dengan bantuan tabel frekuensi dengan presentase sederhana.

Menurut Anton Dayon (1986:37) analisis data adalah data yang telah terkumpul selama penelitian langsung ditabulasikan kemudian disajikan dalam bentuk tabel presentase pada tingkat lebih lanjut dalam proses analisis presentase sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P =	Populasi
F =	Frekuensi
N =	Jumlah Sampel / Responden
100 %	= Nilai Konstan

Peran Pemerintah Kampung (Variabel Bebas) Pengertian Peran

Kata peran atau peranan menurut Rivai (2006:148) dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi, jika dikaitkan peranan Instansi Pemerintah Kampung, maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh aparat Pemerintah Kampung, sesuai dengan posisi dan kemampuan Pemerintah Kampung atau kantor tersebut. Sedangkan menurut Katz dalam Mifta Thoha (2003:80) merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang, dengan pengertian lain peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam menjalankan semua aturan dan wewenang sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya pada kamus bahasa Indonesia tulisan Sofiyah R. E. S (2005:438) menulis pengertian dari peran adalah pemain yang mengambil bagian sesuai dengan tugasnya. Selain itu, Levinson dalam Soerjono Soekanto (1997:296) mengatakan bahwa peran mencakup tiga hal yakni :

- Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat.
- Peran juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social kemasyarakatan. Soekanto (1990:268) menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan "*life-course*," memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan social itu sudah ada scenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar yaitu Negara, ditunjuk seorang Presiden dengan peran yang diatur oleh masyarakat sendiri. Jadi dengan kata lain, sudah tertulis bahwa seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, seorang murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suatu, isteri, ayah, ibu, anak dan seterusnya. Selain itu, jika seorang mematahui scenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi scenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara."

Contohnya dalam era reformasi ini, bila seorang pemimpin atau presiden yang menyalahi scenario atau perannya maka akan dapat didemo oleh masyarakat.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukan seseorang sesuai dengan tugas dan bagiannya yang memberikan dampak di masyarakat.

Peranan Pemerintah Kampung

Terjadinya transformasi pemerintahan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik menuntut adanya pemberian wewenang (pendelegasian) bagi penyelenggaraan pemerintah kampung. Pemberian otonomi kampung membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga penyelenggaraan pemerintah di kampung dapat berjalan dengan baik.

Good governance menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah kampung, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan social-politik untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang perorangan atau kelompok kecil.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di kampung mulai terasa dengan pemberian asas-asas pada penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung (Widjaja, 2003:87). Peran pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintah kampung adalah sebagai berikut :

- a) Kepastian hukum. Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- c) Tertib kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, komodatif, dan selektif.
- d) Keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Proporsionalitas. Asas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- f) Profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Efektivitas dan efisiensi. Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat kampung. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan yang meliputi, *pertama*, Kearifan lokal. Asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung; *kedua*, keberagaman dan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang tidak boleh mendiskriminatif kelompok masyarakat tertentu; *ketiga*, partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintah kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsure masyarakat kampung.

Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Terikat) **Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat (Swasono, 2004). Tingkat kelayakan hidup dipahami secara relatif oleh berbagai kalangan dan latar belakang budaya, mengingat tingkat kelayakan ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat atas kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nantinya akan mewujudkan kebutuhan seorang individu atau kelompok akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- 3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Ada beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik(2000), yaitu:

- 1) Pendapatan
- 2) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
- 3) Keadaan tempat tinggal
- 4) Fasilitas tempat tinggal
- 5) Kesehatan anggota keluarga
- 6) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- 7) Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan.

DATA DAN ANALISIS DATA

Peranan Pemerintah Kampung Penanggung Jawab

Tabel 1
Tanggapan Responden Tentang Tanggungjawab
Aparat Kampung Atas Perannya

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	15	30 %
2	Kadang – Kadang	20	40 %
3	Tidak Pernah	15	30 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 1 tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa ada 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan aparat kampung selalu bertanggungjawab atas peranya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, ada sekitar 20 orang responden atau sekitar 40 % responden yang menyatakan aparat kampung kadang-kadang bertanggungjawab atas peranya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, dan ada 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan aparat kampung tidak pernah bertanggungjawab atas peranya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Adanya Tanggung Jawab Aparat Dengan Baik Dalam
Kapasitasnya Selaku Aparat Kampung

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	15	30 %
2	Kadang – Kadang	20	40 %
3	Tidak Pernah	15	30 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa ada 15 orang responden atau sebanyak 30 % responden yang mengatakan, bahwa aparat kampung selalu bertanggungjawab dengan baik dalam kapasitasnya selaku aparat kampung, ada 20 orang responden atau 40 % responden yang mengatakan, bahwa aparat kampung kadang-kadang bertanggungjawab dengan baik dalam kapasitasnya selaku aparat kampung, dan hanay 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang mengatakan, bahwa aparat kampung tidak pernah bertanggungjawab dengan baik dalam kapasitasnya selaku aparat kampung.

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Adanya Kesiapan Aparat Melakukan
Setiap Pekerjaan Bilamana Perannya Dibutuhkan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	12	24%
2	Kadang – Kadang	13	26%
3	Tidak Pernah	25	50%
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 3 tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa ada 12 orang responden atau sekitar 24 % responden yang menyatakan, bahwa aparat kampung selalu siap-sedia untuk melakukan setiap pekerjaan bilamana perannya dibutuhkan, dan ada sekitar 13 orang responden atau sekitar 26 % responden yang menyatakan, bahwa aparat kampung kadang-kadang siap-sedia untuk melakukan setiap pekerjaan bilamana perannya dibutuhkan, serta ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan, bahwa aparat kampung tidak pernah siap-sedia untuk melakukan setiap pekerjaan bilamana perannya dibutuhkan.

2. Motivator

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Adanya Aparat Bertindak Sebagai Motivator Yang Baik
Bagi Pengembangan Pola Pikir dan Tindakan Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	12	24 %
2	Kadang – Kadang	14	28 %
3	Tidak Pernah	24	48 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 12 orang responden atau sekitar 24 % responden yang menyatakan aparat kampung selalu bertindak sebagai motivator yang baik bagi pengembangan pola pikir dan tindakan masyarakat, ada sekitar 14 orang responden atau sekitar 28 % responden yang menyatakan aparat kampung kadang-kadang bertindak sebagai motivator yang baik bagi pengembangan pola pikir dan tindakan masyarakat, dan ada 24 orang responden atau sekitar 48 % responden yang menyatakan aparat kampung tidak pernah bertindak sebagai motivator yang baik bagi pengembangan pola pikir dan tindakan masyarakat.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Menjalankan Perannya Mampu
Menyemangati Masyarakat Untuk Berpartisipasi Menunjang Kesejahteraan Umumnya

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	15	30%
2	Kadang – Kadang	15	30%
3	Tidak Pernah	20	40%
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 5 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan dalam menjalankan perannya aparat kampung selalu mampu menyemangati masyarakat untuk berpartisipasi menunjang kesejahteraan umumnya, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan dalam menjalankan perannya aparat kampung kadang-kadang mampu menyemangati masyarakat untuk berpartisipasi menunjang kesejahteraan umumnya, dan ada 20 orang responden atau sekitar 40 % responden yang menyatakan dalam menjalankan perannya aparat kampung tidak pernah mampu menyemangati masyarakat untuk berpartisipasi menunjang kesejahteraan umumnya.

Tabel 6

Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Memberikan Motivasi dan Nasehat Secara Berkesinambungan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	12	24%
2	Kadang – Kadang	15	30%
3	Tidak Pernah	23	46%
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 6 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 12 orang responden atau sekitar 24 % responden yang menyatakan aparat kampung selalu memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan aparat kampung kadang-kadang memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan, dan ada 23 orang responden atau sekitar 46 % responden yang menyatakan aparat kampung tidak pernah memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan.

3. Komunikator

Tabel 7

Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Menjadi Komunikator Yang Baik Dalam Bekerja

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	14	28 %
2	Kadang – Kadang	16	32 %
3	Tidak Pernah	20	40 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 7 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 14 orang responden atau sekitar 28 % responden yang menyatakan aparat kampung selalu menjadi komunikator yang baik dalam bekerja, ada sekitar 16 orang responden atau sekitar 32 % responden yang menyatakan aparat kampung kadang-kadang menjadi komunikator yang baik dalam bekerja, dan ada 20 orang responden atau sekitar 40 % responden yang menyatakan aparat kampung tidak pernah menjadi komunikator yang baik dalam bekerja.

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Aparakat Kampung Menggunakan Gaya Bahasa Yang Mudah Ditangkap dan Dimengerti Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	14	28 %
2	Kadang – Kadang	16	32 %
3	Tidak Pernah	20	40 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 8 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 14 orang responden atau sekitar 28 % responden yang menyatakan aparakat kampung selalu menggunakan gaya bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti masyarakat, ada sekitar 16 orang responden atau sekitar 32 % responden yang menyatakan aparakat kampung kadang-kadang menggunakan gaya bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti masyarakat, dan ada 20 orang responden atau sekitar 40 % responden yang menyatakan aparakat kampung tidak pernah menggunakan gaya bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti masyarakat.

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Setiap Komunikasi Yang Digunakan Aparat Kampung Baik Bagi Pembangunan Kampung

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	20	40 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	15	30 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 9 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 20 orang responden atau sekitar 40 % responden yang menyatakan setiap komunikasi yang digunakan aparat kampung selalu baik bagi pembangunan kampung, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan setiap komunikasi yang digunakan aparat kampung kadang-kadang baik bagi pembangunan kampung, dan ada 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan setiap komunikasi yang digunakan aparat kampung tidak pernah baik bagi pembangunan kampung.

Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Terikat)

1. Pendapatan

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Sudah Memiliki Pendapatan Rutin Yang Layak

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Sudah	10	20 %
2	Cukup	15	30 %
3	Belum	25	50 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 10 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan masyarakat kampung sudah memiliki pendapatan rutin yang layak, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan masyarakat kampung cukup memiliki pendapatan rutin yang layak, dan ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan masyarakat kampung belum memiliki pendapatan rutin yang layak.

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Dengan Baik

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	10	20 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	25	50 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 11 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan masyarakat kampung selalu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan masyarakat kampung kadang-kadang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, dan ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan masyarakat kampung tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

Tabel 12
Tanggapan Responden Tentang Adanya Program Pemerintah Untuk Pengembangan Taraf Hidup Layak Masyarakat Kampung

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	8	16 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	27	54 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 12 tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa ada 8 orang responden atau sekitar 16 % responden yang menyatakan program pemerintah kampung selalu untuk pengembangan taraf hidup layak masyarakat kampung, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan program pemerintah kampung kadang-kadang untuk pengembangan taraf hidup layak masyarakat kampung, dan ada 27 orang responden atau sekitar 54 % responden yang menyatakan program pemerintah kampung tidak pernah untuk pengembangan taraf hidup layak masyarakat kampung.

2. Pendidikan

Tabel 13

Tanggapan Responden Tentang Pendidikan Aparat Kampung Mempengaruhi Peranannya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	25	50 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	10	20 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 13 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan pendidikan aparat kampung selalu mempengaruhi peranannya dalam pelayanan kepada masyarakat, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden menyatakan, bahwa pendidikan aparat kampung kadang-kadang mempengaruhi peranannya dalam pelayanan kepada masyarakat, dan ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan pendidikan aparat kampung tidak pernah mempengaruhi peranannya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 14

Tanggapan Responden Tentang Melanjutkan Perannya Dibutuhkan Keahlian Atau Pendidikan Yang Baik Bagi Aparat Kampung

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	25	50 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	10	20 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 14 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan dalam melanjutkan perannya selalu dibutuhkan keahlian atau pendidikan yang baik bagi aparat kampung, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan dalam melanjutkan perannya kadang-kadang dibutuhkan keahlian atau pendidikan yang baik bagi aparat kampung, dan ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan dalam melanjutkan perannya tidak pernah dibutuhkan keahlian atau pendidikan yang baik bagi aparat kampung.

Tabel 15

Tanggapan Responden Tentang Pendidikan Mempengaruhi Peran Aparat Dalam Mengusahakan Kesejahteraan Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	25	50 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	10	20 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 15 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan pendidikan selalu mempengaruhi peran aparat dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan pendidikan kadang-kadang mempengaruhi peran aparat dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat, dan ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan pendidikan tidak pernah mempengaruhi peran aparat dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat.

3. Kesehatan

Tabel 16

Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Kampung Menjaga dan Menjalamin Kesehatan Bagi Keluarga

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	10	20 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	25	50 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 4.16 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang masyarakat kampung selalu menjaga dan menjalamin kesehatan bagi keluarga, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan masyarakat kampung kadang-kadang menjaga dan menjalamin kesehatan bagi keluarga, dan ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan masyarakat kampung tidak pernah menjaga dan menjalamin kesehatan bagi keluarga.

Tabel 17

Tanggapan Responden Tentang Adanya Penyuluhan dan Bimbingan Dari Aparat Kampung Akan Pentingnya Menjaga Kesehatan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	10	20 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	25	50 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 17 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan selalu ada penyuluhan dan bimbingan dari aparat kampung akan pentingnya menjaga kesehatan, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan kadang-kadang ada penyuluhan dan bimbingan dari aparat kampung akan pentingnya menjaga kesehatan, dan ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan tidak pernah ada penyuluhan dan bimbingan dari aparat kampung akan pentingnya menjaga kesehatan.

Tabel 18
Tanggapan Responden Tentang Adanya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Sebagai Salah Satu Kebutuhan Dasar Manusia

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	10	20 %
2	Kadang – Kadang	15	30 %
3	Tidak Pernah	25	50 %
J u m l a h		50	100 %

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2020

Dari data pada tabel 18 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 10 orang responden atau sekitar 20 % responden yang menyatakan selalu ada kesadaran masyarakat akan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, ada sekitar 15 orang responden atau sekitar 30 % responden yang menyatakan kadang-kadang ada kesadaran masyarakat akan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dan ada 25 orang responden atau sekitar 50 % responden yang menyatakan tidak pernah ada kesadaran masyarakat akan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan data dan analisis mengenai peranan pemerintah kampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Kesimpulan

1. Selama ini aparat kampung rata-rata memiliki sedikit rasa tanggungjawab atas perannya, tetapi belum cukup baik dalam menyiapkan dirinya untuk melakukan kewajibannya atas tugas dan tanggungjawab.
2. Sangat rendahnya kemampuan aparat kampung selaku motivator dalam mendorong dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat kemampuan komunikasi aparat kampung masih rendah atau belum terlalu mendukung bagi proses pembangunan kampung.
4. Pendapatan masyarakat masih sangat kurang dan masih jauh dibawah garis kemiskinan.
5. Rendahnya pendidikan aparat kampung dan masyarakatnya.
6. Selama ini bidang kesehatan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat dan aparat kampung.

Saran

1. Demi meningkatkan rasa tanggungjawab atas perannya, maka diharapkan agar Kepala Kampung perlu mengarahkan aparat kampung untuk selalu loyal dan solid dalam bekerja.
2. Untuk meningkatkan kemampuan aparat kampung selaku motivator, maka diharapkan agar aparat kampung perlu dilibatkan dalam pelatihan, kursus dan pelatihan-pelatihan sehingga menimbulkan wawasan dan pengalaman, agar dapat

tampil percaya diri dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi masyarakat yang dilayani.

3. Demi meningkatkan kemampuan komunikasi, maka aparat kampung perlu melatih diri untuk menjadi pendengara yang baik dan berusahalah untuk memahami dengan siapa dia berbicara, serta tunjukkanlah bahasa tubuh yang baik, sehingga kemampuan komunikasinya semakin hari semakin meningkat.
4. Masyarakat kampung perlu didorong terus untuk berkreasi dan inovatif untuk selalu mau mencoba berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan.
5. Kepala Kampung dan aparat kampung perlu segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesembatan kepada aparat kampung dan masyarakat dalam menempuh pendidikan lanjutan, Diklat dan kursus-kursus lainnya, sehingga dapat meningkatkan pendidikan mereka.
6. Seluruh elemen masyarakat bersama seluruh aparat kampung dapat mungkin mengusahakan promosi kesehatan di kampung, pengadaan komunikasi dan posyandu di kampung, memberi pengobatan gratis bagi masyarakat kampung yang sakit, sehingga dapat memacuh kesedaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, Drs. *Kamus 5 Milyar Inggris – Indonesia*, Bintang Indonesia: Jakarta, 2012.
- Effendi, Bachtiar. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta, 2002.
- Leksi J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1993.
- Prasetio, Andi, *Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012.
- Rahmadani, E. S. Sofiya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Agung: Bandung, 2004.
- Sugiyono, Prof. Dr, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung, 2004.
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo, 2006.
- Wasistiono, Sadu dan Erwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Widyastuti. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Supartono, dkk. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.